



Evaluasi Kebijakan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo

Muhammad Afifi Rahman¹⁾, Satunggale Kurniawan^{1),*}

¹⁾Universitas Wijaya Putra

*Correspondence: satunggalekurniawan@uwp.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan profesional guru merupakan aspek krusial dalam peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan implementasi KKG Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, dengan pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-methods, dengan data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% guru menganggap materi KKG relevan, tetapi 65% merasa kurang sesuai dengan konteks siswa multilingual. Sumber daya terbatas, di mana hanya 40% pertemuan KKG yang menggunakan fasilitas digital. Partisipasi aktif guru dalam KKG masih rendah (25%), dan metode pelatihan didominasi oleh ceramah (85%). Dampak terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia cukup signifikan, dengan peningkatan 15% dalam kemampuan membaca kritis siswa. Namun, integrasi teknologi dalam pengajaran masih menjadi tantangan, dengan hanya 20% guru yang berhasil mengimplementasikannya. Evaluasi ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti kontekstualisasi materi KKG untuk siswa multilingual, digitalisasi pertemuan KKG, pendampingan berkelanjutan bagi guru, serta penyederhanaan prosedur administratif agar anggaran dapat terserap secara optimal. Implikasi kebijakan yang diusulkan meliputi revisi panduan KKG oleh Dinas Pendidikan serta penguatan kapasitas fasilitator dalam metode pembelajaran berbasis teknologi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Kelompok Kerja Guru; Bahasa Indonesia

Received: 06 Mar 2025; **Revised:** 19 Apr 2025; **Accepted:** 23 Mei 2025; **Available Online:** 10 Jun 2025

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di kalangan guru Bahasa Indonesia. KKG merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru melalui diskusi, pelatihan, dan kolaborasi. Melalui KKG, diharapkan guru-guru dapat memperkaya keterampilan pedagogik, menguasai teknologi pembelajaran terkini, dan berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan pembelajaran di kelas. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengembangkan kemampuan guru agar dapat menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan wadah kolaborasi profesional guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesional, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kebijakan KKG di Indonesia diatur melalui Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, yang menekankan pentingnya pengembangan diri guru melalui forum seperti KKG. Pentingnya Pengembangan Profesional Guru dalam Pengembangan profesional guru merupakan kunci peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Nadiem Anwar Makarim (2022), menegaskan bahwa guru yang baik adalah guru yang terus belajar, banyak bertanya, banyak mencoba, dan banyak berkarya. Guru dan kepala sekolah harus berani mengambil risiko untuk kemajuan pendidikan agar siswa dapat lebih berkreasi dan berinovasi. Di Indonesia, upaya ini diwujudkan melalui program seperti KKG, yang bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Namun, efektivitasnya perlu dievaluasi secara berkala, terutama di daerah dengan dinamika pendidikan spesifik seperti Kecamatan Tanggulangin.

Meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh guru-guru di Kecamatan Tanggulangin adalah keterbatasan sumber daya,

baik dalam hal fasilitas, dukungan teknologi, maupun ketersediaan tenaga ahli yang dapat menjadi fasilitator. Seringkali, kegiatan KKG di tingkat kecamatan lebih bergantung pada inisiatif pribadi guru dan kepala sekolah, bukan hasil dari pengelolaan yang terencana dan terstruktur dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam KKG terkadang kurang optimal karena terbatasnya waktu yang tersedia untuk para guru, mengingat mereka harus memenuhi tuntutan administratif dan tugas mengajar yang padat. Dalam hal ini Peran KKG dalam Kebijakan Pendidikan Nasional adanya KKG merupakan bagian dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang diatur dalam Permendikbud No. 15 Tahun 2018. Menurut Nurkamto (2019), KKG berfungsi sebagai wadah kolaborasi guru untuk memecahkan masalah pembelajaran. Namun, implementasinya seringkali tidak merata karena faktor geografis, sumber daya, dan komitmen anggota, sehingga evaluasi kebijakan menjadi penting untuk memastikan tujuan tercapai.

Selain itu, salah satu tantangan besar yang muncul adalah kesenjangan antara materi yang diajarkan dalam KKG dan kemampuan guru untuk menerapkannya secara efektif di kelas. Beberapa guru melaporkan bahwa meskipun mereka mendapatkan pelatihan mengenai metode baru atau kurikulum yang diperbarui, kesulitan dalam penerapan materi tersebut muncul karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak, seperti kepala sekolah atau rekan sejawat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap proses dan hasil dari kegiatan KKG ini untuk memastikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai dengan efektif. Evaluasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keberhasilan pelaksanaan KKG di tingkat lokal. Konsep Evaluasi Kebijakan Pendidikan dengan adanya Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai dampak suatu program. Dunn (2018) menjelaskan bahwa evaluasi harus mencakup aspek relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan. Dalam konteks KKG, pendekatan ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana kegiatan tersebut menjawab kebutuhan guru Bahasa Indonesia di Tanggulangin, terutama terkait kurikulum dan metode pembelajaran abad ke-21.

Konteks lokal juga memainkan peran penting dalam evaluasi kebijakan KKG ini. Kecamatan Tanggulangin, yang memiliki beragam karakteristik sosial dan ekonomi, membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan KKG. Dengan mayoritas sekolah di kecamatan ini yang berada di daerah pinggiran, tantangan infrastruktur dan akses terhadap teknologi masih sangat terasa. Sebagian besar sekolah belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga pelatihan yang dilakukan dalam KKG terkait penggunaan teknologi pembelajaran terkadang tidak dapat diterapkan dengan maksimal. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pembelajaran berbasis teknologi juga belum sepenuhnya merata di kalangan guru dan pihak sekolah. Dalam hal ini KKG sebagai Komunitas Belajar Profesional, Darling-Hammond (2017) menekankan bahwa komunitas belajar seperti KKG harus fokus pada praktik reflektif dan berbagi pengetahuan. Studi Supriyoko (2020) di Jawa Timur menunjukkan bahwa KKG yang efektif mampu meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 25%. Namun, tantangan seperti keterbatasan waktu dan fasilitas sering menghambat capaian tersebut, terutama di daerah semi-urban seperti Tanggulangin.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kebijakan KKG Bahasa Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Meskipun tujuan umum kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, pencapaiannya dapat terhambat oleh faktor-faktor lokal yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam terhadap implementasi kebijakan KKG di tingkat kecamatan ini sangat diperlukan untuk menilai efektivitasnya, serta untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi setempat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, pelatihan yang relevan, dan penyediaan dukungan teknis yang lebih baik. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, kebijakan KKG di Kecamatan Tanggulangin dapat diperbaiki untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas pendidikan di daerah tersebut. Melda Delvia, Remiswal Remiswal, Ahmad Sabri (2024) Program KKG menunjukkan dampak positif terhadap profesionalisme guru, meskipun terdapat tantangan dalam perencanaan, evaluasi berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi. Serta penelitian dari Muhammad Izaz Rais (2020). Peran KKG dalam pengembangan kompetensi guru menunjukkan hasil yang baik, meskipun terdapat variasi dalam tingkat klasifikasi guru. Di Tanggulangin, laporan Dinas Pendidikan Sidoarjo (2022) menunjukkan 40% guru masih kesulitan menerapkan materi KKG akibat beban administratif. Hal ini mengindikasikan perlunya penyesuaian kebijakan agar lebih kontekstual.

Dampak KKG pada Pembelajaran Bahasa Indonesia, Guskey (2002) menyatakan bahwa pelatihan guru harus berdampak pada perubahan praktik mengajar. Survei awal di 10 SD Tanggulangin (2023) menemukan bahwa 60% guru telah menggunakan strategi literasi dari KKG, tetapi hanya 35% yang mampu mengintegrasikan teknologi. Ini menunjukkan adanya gap antara pelatihan dan implementasi, yang perlu dikaji melalui evaluasi menyeluruh. Peran Kebijakan Daerah dalam Mendukung KKG, Menurut Patton (2018),

keberhasilan program pendidikan bergantung pada dukungan struktural. Perda Sidoarjo No. 5/2021 tentang Pengembangan Guru menyebutkan alokasi dana untuk KKG, namun audit Bawasda (2023) mengungkap 30% dana tidak terserap karena prosedur yang rumit. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan riil guru.

KKG di era digital, Hargreaves (2021) menegaskan bahwa komunitas guru harus adaptif terhadap teknologi. Di Tanggulangin, hanya 20% pertemuan KKG yang menggunakan platform digital (Data Pokja KKG, 2023). Padahal, studi Hopkins (2020) membuktikan bahwa *hybrid learning* meningkatkan partisipasi guru hingga 50%. Evaluasi kebijakan perlu memprioritaskan aspek digitalisasi untuk memperluas jangkauan KKG. Urgensi evaluasi kontekstual di Tanggulangin, penelitian oleh Maulana (2022) di Sidoarjo menunjukkan bahwa KKG Bahasa Indonesia belum menyentuh kebutuhan spesifik seperti pembelajaran siswa multilingual. Oleh karena itu, evaluasi menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam (2003) direkomendasikan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural, serta merancang solusi berbasis bukti.

Tujuan penelitian ini yaitu menilai efektivitas kebijakan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kegiatan KKG yang diselenggarakan sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dalam mengembangkan kemampuan pedagogik dan profesionalisme guru. Serta adanya analisis tantangan yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan KKG di tingkat kecamatan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan manajerial dari sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mengurangi efektivitas kegiatan KKG di lapangan. Dan juga mengidentifikasi kesenjangan antara materi pelatihan yang diberikan dalam kegiatan KKG dan penerapannya di kelas. Penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang menyebabkan penerapan hasil pelatihan dalam praktek mengajar belum maksimal, serta memberikan rekomendasi terkait hal ini. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan KKG berdasarkan temuan dari evaluasi ini, untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Tanggulangin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam untuk mengevaluasi kebijakan dan implementasi kegiatan KKG Bahasa Indonesia secara menyeluruh. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling dan meliputi guru-guru Bahasa Indonesia anggota KKG di Kecamatan Tanggulangin, ketua KKG, pengawas pembina, serta kepala sekolah, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan KKG. Desain penelitian bersifat evaluatif kualitatif yang mencakup identifikasi konteks kebijakan, analisis input seperti kebutuhan dan sumber daya, evaluasi proses pelaksanaan kegiatan, hingga penilaian hasil berupa dampak kegiatan terhadap profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran. Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, dan lembar dokumentasi administratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan KKG, dan studi dokumentasi terhadap berbagai laporan dan bukti administratif. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi data, penyajian data secara deskriptif naratif dan tabel, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disusun berdasarkan komponen CIPP untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan implementasi KKG Bahasa Indonesia berjalan sesuai harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, berjalan cukup efektif dalam mendukung peningkatan kompetensi guru. Guru-guru Bahasa Indonesia secara umum merasakan manfaat dari kegiatan KKG, terutama dalam hal peningkatan keterampilan menyusun modul ajar Kurikulum Merdeka, variasi dalam metode pembelajaran, serta meningkatnya kepercayaan diri dalam mengelola kelas. Namun, keterbatasan dana operasional, tingkat kehadiran guru yang fluktuatif, serta belum adanya instrumen evaluasi dampak yang terstandar menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan. Dukungan dari pengawas dan dinas pendidikan sudah terlihat, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek monitoring dan penguatan program.

Tabel 1. Jumlah Guru Bahasa Indonesia

Nama Sekolah	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
1	5	10	15
3	4	7	11
4	1	7	8
5	4	5	9
6	1	9	10
7	1	10	11
Total	16	48	64

Ditinjau dari latar pendidikan, dari 64 orang guru tersebut di atas, sebanyak 11 orang (17,189%) berpendidikan S2, berpendidikan D1 sebanyak 1 orang (1.56%), berpendidikan D2 sebanyak 22 orang (34,37%), dan berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 30 orang (46,87%). Dari data di atas terlihat bahwa hampir separuh dari jumlah guru-guru SD di wilayah kecamatan Tanggulangin mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Izaz Rais (2020) di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, yang menyatakan bahwa KKG berperan positif dalam peningkatan kompetensi guru PJOK, meskipun keaktifan dan konsistensi partisipasi guru menjadi tantangan utama. Kegiatan KKG dinilai sebagai sarana efektif untuk berbagi praktik baik dan mendiskusikan persoalan pembelajaran, sebagaimana juga tercermin dalam hasil penelitian ini. Kemiripan juga terlihat dalam hal kendala pendanaan dan pentingnya dukungan dari kepala sekolah serta pengawas, dua faktor yang disebut krusial dalam menjaga keberlangsungan kegiatan KKG. Perbandingan lain dapat dilihat pada studi Nur Marhamah (2022) di Kabupaten Soppeng, yang menunjukkan bahwa KKG berbasis Kurikulum Merdeka berdampak signifikan terhadap kompetensi guru PAI dan Budi Pekerti. Dalam penelitian ini, efek serupa ditemukan, di mana guru Bahasa Indonesia lebih siap menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif. Ini menunjukkan bahwa implementasi KKG yang diarahkan pada kebutuhan kontekstual dan kurikulum terbaru mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pengajaran lintas mata pelajaran.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga senada dengan temuan Melda Delvia dkk. (2024) tentang KKG PAI di Kabupaten Agam, yang menekankan perlunya perencanaan program yang terstruktur dan adanya evaluasi berkelanjutan untuk menjamin efektivitas kegiatan. Di Tanggulangin, belum adanya sistem evaluasi formal terhadap dampak KKG menjadi kelemahan yang juga disebutkan dalam penelitian Delvia. Keduanya menekankan pentingnya mengubah KKG dari sekadar forum diskusi menjadi komunitas pembelajar profesional yang mampu menciptakan inovasi pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran KKG di berbagai daerah memiliki pola manfaat dan tantangan yang hampir serupa, dan hasil penelitian ini memperkuat bukti bahwa dengan pengelolaan yang tepat, KKG dapat menjadi instrumen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan.

Evaluasi Konteks

Kebutuhan Guru: Sebanyak 70% guru menyatakan bahwa materi KKG relevan dengan kebutuhan pengajaran Bahasa Indonesia, namun 65% mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan konteks siswa multilingual di Tanggulangin (data kuesioner). **Kebijakan Daerah:** analisis dokumen menunjukkan bahwa 30% anggaran KKG tidak terserap karena prosedur administrasi yang kompleks, sesuai temuan Bawasda Sidoarjo (2023). Hasil penelitian mengenai evaluasi dan konteks kegiatan KKG Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin menunjukkan bahwa latar belakang dan kebutuhan terbentuknya KKG berakar dari kesenjangan kompetensi antar guru, minimnya ruang kolaboratif di sekolah, serta dorongan kebijakan pemerintah untuk pengembangan profesi berkelanjutan. KKG menjadi alternatif strategis dalam menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan wadah pembelajaran kolektif bagi guru. Dalam praktiknya, guru-guru merasa terbantu dengan keberadaan forum ini untuk berbagi masalah pembelajaran, menyusun perangkat ajar, dan memahami implementasi kurikulum baru seperti Kurikulum Merdeka.

Evaluasi konteks menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan pembentukan dan pelaksanaan KKG sudah selaras dengan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Namun, secara empiris, implementasi kegiatan di lapangan masih sangat bergantung pada inisiatif guru dan dukungan kepala sekolah. Kurangnya fasilitator ahli, dukungan dana, serta belum adanya sistem penilaian dampak jangka panjang menjadikan KKG belum sepenuhnya berjalan optimal. Guru yang aktif dalam KKG

menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguasaan materi ajar dan keterampilan pedagogik, tetapi tidak semua sekolah memiliki komitmen yang sama terhadap penguatan KKG.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wartoni dan Kartowagiran (2020) di Kabupaten Batang yang mengevaluasi program BERMUTU dan menemukan bahwa KKG sangat potensial dalam meningkatkan mutu guru, namun perlu dukungan sistemik yang lebih kuat dari Dinas Pendidikan. Penelitian Debby Maulina dkk. (2022) di Palembang juga mengungkap bahwa keberhasilan KKG tematik sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen kegiatan dan keaktifan anggotanya. Sementara Musmulyadi (2022) di Riau menunjukkan bahwa keterlibatan guru dalam diskusi-diskusi KKG mendorong pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, menunjukkan bahwa konteks lokal sangat memengaruhi relevansi kegiatan KKG.

Perbandingan dengan studi Melda Delvia dkk. (2024) di Kabupaten Agam menguatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan KKG berpotensi menjadi formalitas semata. Mereka menggunakan model evaluasi CIPP dan menekankan bahwa keberhasilan KKG sangat bergantung pada kejelasan tujuan, sumber daya, proses kegiatan, dan evaluasi hasil. Maka, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara kontekstual, KKG di Tanggulangin memiliki dasar yang kuat dan kebutuhan nyata di kalangan guru. Namun agar lebih optimal, perlu penguatan manajemen kegiatan, peningkatan kapasitas fasilitator, serta sistem monitoring berbasis capaian guru. Evaluasi yang berkelanjutan akan sangat membantu dalam memastikan KKG tidak hanya sebagai forum rutin, tapi sebagai motor perubahan pembelajaran di kelas.

Evaluasi Masukan

Sumber Daya: hanya 40% pertemuan KKG menggunakan fasilitas memadai seperti akses internet dan modul digital. Sebanyak 55% guru mengeluhkan keterbatasan waktu karena padatnya jadwal mengajar (wawancara). Kompetensi fasilitator: 80% responden menilai fasilitator KKG kompeten, tetapi hanya 35% yang menyatakan materi pelatihan mengintegrasikan teknologi (analisis kuesioner). Evaluasi pada aspek masukan (input) dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin menunjukkan bahwa secara umum, kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung masih bervariasi antar satuan pendidikan. Guru-guru yang terlibat dalam KKG memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, dan sebagian besar telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun, kapasitas sebagai fasilitator atau mentor dalam forum KKG belum merata, sehingga kegiatan seringkali masih bersifat satu arah dan kurang interaktif. Sarana pendukung seperti ruang pertemuan, akses internet, dan bahan ajar terkadang tidak tersedia secara optimal, terutama pada sekolah-sekolah kecil yang menjadi tuan rumah kegiatan bergilir.

Dari segi pendanaan, kegiatan KKG masih sangat mengandalkan swadaya dari guru peserta, serta bantuan sukarela dari kepala sekolah. Belum semua kegiatan dibiayai secara langsung oleh dana BOS atau bantuan dari Dinas Pendidikan. Akibatnya, frekuensi kegiatan dan kualitas pelatihan sangat tergantung pada semangat dan kemandirian guru. Selain itu, tidak semua KKG memiliki narasumber eksternal atau pengawas pembina yang aktif hadir dalam kegiatan, sehingga pembaruan informasi dan praktik pembelajaran terbaru tidak selalu dapat diterapkan secara optimal.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Debby Maulina dkk. (2022) di Palembang yang menunjukkan bahwa kualitas input—khususnya kompetensi fasilitator dan dukungan fasilitas—memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kinerja guru melalui kegiatan KKG tematik. Penelitian Nur Marhamah (2022) di Kabupaten Soppeng juga menyatakan bahwa keberhasilan KKG berbasis Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada input berupa kesiapan materi pelatihan, kehadiran pendamping ahli, dan keterlibatan aktif guru. Hal serupa ditegaskan dalam penelitian Wartoni dan Kartowagiran (2020) di Kabupaten Batang, yang menyebutkan bahwa input berkualitas menjadi penentu keberhasilan jangka panjang program peningkatan mutu guru, termasuk melalui KKG.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kegiatan KKG di Tanggulangin dalam meningkatkan kompetensi guru Bahasa Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan pada aspek input. Diperlukan kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah daerah untuk mendorong ketersediaan fasilitator profesional, penyediaan sarana teknologi pendukung, serta pengalokasian dana yang memadai. Penguatan pada tahap input ini menjadi krusial agar KKG tidak hanya berlangsung sebagai formalitas, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan. Evaluasi masukan yang menyeluruh dapat menjadi dasar penting untuk menyusun perencanaan strategis peningkatan mutu kegiatan KKG secara nasional.

Evaluasi Proses

Keterlibatan guru: 60% guru hadir secara konsisten di KKG, tetapi partisipasi aktif (seperti berbagi praktik baik) hanya mencapai 25% (observasi dan wawancara). Metode pelatihan: 85% kegiatan masih bersifat ceramah satu arah, sementara metode partisipatif seperti workshop hanya 15% (analisis dokumen agenda KKG). Evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan KKG Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin menunjukkan bahwa secara umum, kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disusun oleh pengurus. Agenda rutin seperti diskusi pedagogik, bedah soal AKM, dan penyusunan perangkat ajar telah dilaksanakan secara bergilir di beberapa sekolah. Proses pelaksanaan ditandai dengan keterlibatan aktif sebagian besar guru, terutama yang sudah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya peningkatan kompetensi. Namun demikian, kehadiran tidak selalu konsisten karena berbenturan dengan tugas administratif guru atau jadwal mengajar yang padat.

Dari hasil observasi dan wawancara, tampak bahwa proses pelaksanaan KKG masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan waktu, tidak meratanya kemampuan fasilitator, serta minimnya penggunaan teknologi pembelajaran. Metode diskusi yang digunakan sering kali masih konvensional, kurang melibatkan simulasi atau praktik langsung. Beberapa guru menyampaikan bahwa materi pelatihan kadang bersifat pengulangan dari tahun ke tahun dan belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan kurikulum terbaru. Meskipun begitu, proses kolaborasi dan semangat saling berbagi pengalaman di antara guru tetap menjadi nilai positif dari pelaksanaan KKG ini.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Musmulyadi (2022) yang mengevaluasi proses KKG di Kabupaten Rokan Hilir. Ia menemukan bahwa efektivitas proses pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan dan keterlibatan aktif peserta. Demikian juga dengan penelitian Melda Delvia dkk. (2024) di Kabupaten Agam, yang menunjukkan bahwa lemahnya proses pelaksanaan KKG disebabkan oleh kurangnya evaluasi berkala dan tidak adanya pelatihan khusus bagi fasilitator. Sementara itu, Wartoni dan Kartowagiran (2020) dalam evaluasi program BERMUTU menyarankan adanya perbaikan proses pelaksanaan agar kegiatan tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi wadah pembelajaran reflektif bagi guru.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan KKG Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin berjalan dengan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Dibutuhkan inovasi dalam metode pelaksanaan kegiatan, penguatan peran fasilitator, serta sistem evaluasi proses yang berkelanjutan. Perlu juga integrasi teknologi pembelajaran agar proses kegiatan lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan guru di era digital. Dengan memperbaiki proses, maka efektivitas KKG dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru akan lebih terasa dampaknya secara langsung dalam praktik pembelajaran di kelas.

Evaluasi Hasil (Product)

Peningkatan kompetensi: 50% guru melaporkan peningkatan keterampilan menyusun RPP berbasis literasi, tetapi hanya 20% yang mampu mengaplikasikan teknologi dalam evaluasi pembelajaran (data kuantitatif). Dampak pada siswa: analisis nilai siswa menunjukkan peningkatan 15% pada kemampuan membaca kritis, namun tidak signifikan di aspek menulis kreatif (data sekunder nilai ujian sekolah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi profesional guru. Sebagian besar guru yang mengikuti kegiatan KKG melaporkan adanya peningkatan dalam keterampilan menyusun perangkat ajar dan penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Guru-guru juga merasa lebih percaya diri dalam mengelola kelas dan menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan siswa, terutama dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Meski demikian, dampak terhadap hasil belajar siswa masih sulit diukur secara langsung, karena evaluasi dilakukan lebih pada aspek pembelajaran dan bukan pada capaian siswa secara sistematis.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Musmulyadi (2022) di Riau, yang juga menemukan bahwa meskipun KKG dapat meningkatkan kompetensi guru, efeknya terhadap hasil belajar siswa membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk terlihat secara jelas. Penelitian Debby Maulina dkk. (2022) di Palembang juga menekankan bahwa meskipun KKG mampu meningkatkan pemahaman guru mengenai kurikulum baru dan metode pembelajaran, pengaruh langsung terhadap hasil belajar siswa tidak selalu dapat diukur secara instan. Seiring berjalannya waktu, diharapkan penerapan hasil pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif di kelas akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Namun, penelitian Wartoni dan Kartowagiran (2020) di Kabupaten Batang menyarankan bahwa KKG seharusnya lebih fokus pada pembentukan mekanisme evaluasi yang mengukur capaian kompetensi guru secara kuantitatif dan dampak langsungnya terhadap siswa. Tanpa adanya evaluasi berbasis indikator yang jelas, sulit untuk menilai apakah peningkatan keterampilan guru berimbas pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, Melda Delvia dkk. (2024) dalam penelitiannya di Agam mengungkapkan pentingnya evaluasi hasil KKG yang lebih terstruktur, misalnya melalui asesmen pasca pelatihan yang dapat mengukur perubahan dalam kemampuan guru dan dampaknya terhadap pencapaian akademik siswa.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa KKG Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin telah memberikan dampak positif pada kompetensi guru, namun untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya sistem evaluasi yang lebih terukur dan terstruktur. Evaluasi hasil yang tidak hanya berbasis pada peningkatan keterampilan guru, tetapi juga pada dampaknya terhadap hasil belajar siswa, akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan program ini. Dalam hal ini, penggunaan instrumen evaluasi yang lebih sistematis, serta penerapan asesmen berbasis kelas, perlu dipertimbangkan untuk memantau hasil dari pelaksanaan KKG secara lebih menyeluruh.

Pembahasan

Relevansi KKG dengan Konteks Lokal

Temuan bahwa KKG belum sepenuhnya menjawab kebutuhan siswa multilingual sejalan dengan penelitian Maulana (2022) di Sidoarjo, yang menyoroti minimnya pelatihan guru untuk konteks kebahasaan kompleks. Hal ini bertentangan dengan prinsip kontekstualisasi kurikulum yang diamanatkan Permendikbud No. 15/2018. Seperti diungkapkan Darling-Hammond (2017), komunitas belajar guru harus responsif terhadap karakteristik sosio-kultural peserta didik.

Kegiatan penyusunan rancangan ini sangat menentukan untuk keberhasilan kegiatan itu sendiri, sebab dengan keberhasilan itu akan berdampak pada (1) peningkatan kemampuan dan keterampilan instruksional guru; (2) memajukan pola dan jenis interaksi antara guru dan murid ke tahapan yang lebih baik; (3) mengembangkan perilaku guru dalam pengelolaan kelas yang lebih kreatif, dan (4) dapat menumbuhkan kreativitas dan komitmen guru dalam memberikan bantuan pelayanan kepada siswa. Program kerja yang baik memiliki karakteristik: (1) dapat dilaksanakan dan tidak terlalu muluk; (2) disepakati bersama; (3) kegiatan beragam dan tidak menjemukan; (4) sesuai dengan kebutuhan; (5) konkrit dan jelas; serta (6) lebih menitikberatkan pada masalah pembinaan profesional daripada administrasi.

Tantangan Implementasi Kebijakan

Rendahnya penyerapan anggaran KKG (30%) mengindikasikan masalah birokrasi yang juga ditemukan dalam studi Patton (2018) tentang kebijakan pendidikan di daerah. Padahal, Fullan (2016) menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan bergantung pada dukungan struktural dan finansial yang memadai. Prosedur administrasi yang rumit perlu disederhanakan agar alokasi dana tepat sasaran.

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk menjalankan kegiatan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara belum tentu ia dapat melaksanakan tugas sebagai seorang guru, sebab untuk menjadi seorang guru diperlukan syarat-syarat khusus. Apalagi sebagai guru harus meningkatkan keprofesionalannya yaitu harus menguasai dengan benar seluk beluk pendidikan dan pengajaran serta terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menimbulkan tantangan bagi guru untuk senantiasa meningkatkan peranan dan kompetensinya dalam menghadapi tugas yang diembannya.

Upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan di bidang akademik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan yang sudah dirancang oleh dinas pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan KKG. Kesiapan guru untuk melakukan kegiatan KKG ini tentu dipengaruhi oleh (1) perspsi guru tentang makna KKG, (2) pemahaman tentang tujuan kegiatan, dan (3) motivasi untuk melakukan kegiatan.

Kesenjangan Antara Pelatihan dan Praktik

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Kecamatan Tanggulangin telah memberikan pelatihan yang signifikan bagi para guru, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pelatihan yang diterima dengan implementasinya dalam praktik di kelas. Banyak guru

melaporkan bahwa meskipun mereka memperoleh banyak informasi baru dan teknik pembelajaran selama kegiatan KKG, penerapannya terkadang terhambat oleh faktor-faktor eksternal, seperti keterbatasan waktu, beban administratif, dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Kesenjangan ini menciptakan kesulitan dalam mengintegrasikan metode baru yang dipelajari ke dalam pembelajaran sehari-hari, meskipun mereka telah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai teori dan strategi pembelajaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizky Wulandari (2017) yang menyoroti adanya gap antara pelatihan guru dan aplikasi praktis di lapangan. Wulandari mencatat bahwa meskipun guru mengikuti pelatihan dengan penuh perhatian, mereka sering kali kesulitan dalam menerapkan apa yang dipelajari karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti waktu yang terbatas untuk merencanakan dan melaksanakan strategi baru serta kekurangan dalam fasilitas teknologi menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini juga tercermin dalam penelitian Jannah (2020) yang mengungkapkan bahwa meskipun pelatihan berbasis Kurikulum Merdeka berhasil meningkatkan pemahaman guru tentang pendekatan baru, praktik pengajaran di kelas masih belum sepenuhnya berubah.

Kesenjangan antara pelatihan dan praktik juga ditemukan dalam penelitian Fahrudin (2019) di Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru yang mengikuti pelatihan berbasis KKG merasa kesulitan dalam menerapkan materi yang diajarkan karena kurangnya waktu untuk refleksi dan implementasi secara bertahap di kelas. Fahrudin menyarankan agar pelatihan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga menyediakan waktu bagi guru untuk melakukan praktik langsung dan menerima umpan balik dari kolega mereka. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Musmulyadi (2022) yang menyebutkan bahwa meskipun pelatihan yang diberikan di KKG sudah mencakup berbagai aspek, seperti penyusunan RPP dan asesmen, namun dalam pelaksanaannya, guru lebih sering kembali ke metode lama yang sudah terbiasa mereka gunakan.

Sebagai upaya mengatasi kesenjangan ini, penting untuk menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan mendalam, serta penyediaan waktu yang cukup untuk guru melakukan praktik di kelas dengan dukungan dari rekan sejawat dan fasilitator. Sejalan dengan rekomendasi Alfiansyah (2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa keberhasilan pelatihan akan lebih optimal jika diikuti dengan sesi mentoring dan kolaborasi di sekolah. Dalam konteks ini, KKG perlu berfungsi tidak hanya sebagai tempat untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga sebagai forum untuk refleksi dan praktik langsung yang terus-menerus diiringi dengan evaluasi dan umpan balik yang konstruktif.

Partisipasi Guru yang Pasif

Motivasi guru yang mendorong untuk terlibat dalam KKG ini nampaknya terkait dengan apa yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan KKG. Dorongan yang muncul lebih disebabkan oleh dorongan ekstrinsik yang lebih mendominasi daripada dorongan yang bersifat intrinsik. Rendahnya partisipasi aktif guru (25%) dalam KKG mencerminkan budaya kerja yang hierarkis, di mana guru cenderung sebagai penerima pasif pengetahuan. Menurut Hargreaves (2021), partisipasi aktif hanya mungkin tercapai jika KKG berfungsi sebagai komunitas praktisi (*community of practice*), bukan sekadar forum administratif. Studi Hopkins (2020) menyarankan penggunaan platform digital untuk meningkatkan kolaborasi, namun di Tanggulangin, hal ini belum dioptimalkan (hanya 20% pertemuan *hybrid*).

Dampak Terbatas pada Hasil Belajar Siswa

Media pembelajaran dapat digunakan untuk (1) mendemonstrasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa sebagai sarana untuk memberikan “persiapan laboratorium” untuk melihat bagaimana percobaan itu dilakukan, (2) mensimulasikan pengalaman yang sebenarnya, (3) memperbaiki persepsi siswa, (4) mendemonstrasikan keterampilan motorik, (5) memperjelas konsep, (6) memberikan bahan stimulus.

Prinsip yang dipakai dalam menggunakan media pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) tidak ada satu mediapun yang cocok untuk segala macam kegiatan belajar mengajar, (2) penggunaan berbagai jenis media secara berlebihan dan tidak berdasarkan teori pemilihan media justru akan mengaburkan isi pesannya, (3) sebelum menggunakan media hendaknya guru melakukan persiapan yang cermat terhadap keberadaan media, (4) media merupakan bagian integral dari proses pembelajaran.

Penentuan alat penilaian lebih ditekankan pada penyusunan butir soal dan analisis hasil ulangan. Dalam penyusunan butir soal, langkah awal yang harus dikerjakan guru adalah menyusun tabel spesifikasi yaitu suatu tabel yang mencantumkan pokok bahasan materi pelajaran, tingkat kemampuan berdasarkan jenjang kognitif,

afektif dan psikomotorik, jumlah soal dan persebarannya. Dalam menyusun analisis hasil ulangan lebih ditekankan pada kegiatan untuk mendapatkan umpan balik tentang tingkat daya serap siswa terhadap materi pelajaran baik yang bersifat individual atau kelompok.

Pada pelaksanaan KKG, materi yang seharusnya diberikan atau dikerjakan dalam kegiatan KKG adalah materi yang terkait dengan tugas yang dilaksanakan guru sehari-hari. Dengan demikian materi yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru untuk meningkatkan profesinya. Peningkatan 15% kemampuan membaca kritis siswa menunjukkan bahwa KKG berpotensi meningkatkan pembelajaran, tetapi belum optimal. Menurut Supriyoko (2020), peningkatan hasil belajar siswa berkorelasi langsung dengan intensitas pelatihan guru. Di Tanggulangin, frekuensi KKG hanya 4 kali/tahun, jauh di bawah rekomendasi UNESCO (minimal 8 kali/tahun) untuk mencapai dampak signifikan.

Rekomendasi Perbaikan Berbasis Bukti

Berdasarkan model CIPP Stufflebeam (2003), rekomendasi strategis meliputi: 1) Kontekstualisasi Materi yaitu mengembangkan modul KKG berbasis kebutuhan siswa multilingual; 2) Digitalisasi KKG, mengadopsi platform seperti *Google Classroom* untuk pertemuan *hybrid*; 3) Pendampingan Berkelanjutan, membentuk tim mentor dari guru berpengalaman; dan 4) Simplifikasi Administrasi, memangkas prosedur birokrasi penyerapan anggaran.

Keterbatasan Penelitian

Sampel Terbatas: Penelitian hanya melibatkan guru SD, belum mencakup jenjang SMP/SMA. Variabel Eksternal: Faktor seperti latar belakang pendidikan guru tidak dikontrol secara penuh. Durasi Observasi: Data dikumpulkan dalam 3 bulan, sehingga dampak jangka panjang KKG belum terukur.

Implikasi Kebijakan

Penyelarasan Kebijakan: Dinas Pendidikan perlu merevisi Panduan KKG dengan memasukkan indikator kontekstualisasi dan digitalisasi. Penguatan Kapasitas Fasilitator: Pelatihan khusus untuk fasilitator KKG dalam metode partisipatif dan teknologi pendidikan. Monitoring Berbasis Data: Membangun sistem database kinerja KKG yang terintegrasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus, mengandung makna bahwa yang bekerja dalam kelompok tersebut adalah para guru yg dahulu dewasa, karena itu pendekatan yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut harus mendekati metodenya dengan konsep andragogi. Untuk mengembangkan konsep diri dalam menghadapi orang dewasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: (1) hendaknya diciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk mengembangkan konsep diri orang dewasa, perlu diciptakan suasana hidup yang sesuai dengan ciri-ciri orang dewasa, (2) identifikasi kebutuhan peserta didik, (3) proses perencanaan bersama, (4) memimpin pengalaman belajar, dan (5) evaluasi belajar.

Keberhasilan program pembinaan melalui kegiatan KKG bergantung pada cara pembina berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru. Agar kegiatan KKG dapat berjalan intensif maka pembina perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) pembinaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang positif, (2) hubungan antara pembina dan guru didasarkan atas hubungan kerabat kerja, (3) pembinaan hendaknya didasarkan pada pandangan yang obyektif, (4) pembinaan hendaknya didasarkan pada tindakan yang manusiawi, (5) pembinaan hendaknya mendorong pengembangan potensi, inisiatif, dan kreativitas guru, (6) pembinaan harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan serta tidak mengganggu jam belajar efektif, (7) pembinaan hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru, (8) pembinaan hendaknya dilaksanakan atas dasar rasa kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan dan keteladanan, (9) pembina hendaknya mampu tampil dalam peran yang beragam, dan (10) dalam pembinaan hendaknya pembina mampu mengendalikan diri.

Guru-guru sekolah dasar diharapkan menjadi guru yang benar-benar memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Direktorat Pendidikan Dasar, mengembangkan lima kemampuan dasar guru yang perlu pokok dan harus dimiliki guru SD, yakni: (1) penguasaan kurikulum, (2) penguasaan materi setiap mata pelajaran, (3) penguasaan metode dan evaluasi, (4) komitmen guru terhadap tugas, dan (5) disiplin dalam arti luas hasil dan pembahasan ini menggabungkan temuan empiris dengan perspektif teoritis untuk memberikan analisis kritis terhadap kebijakan KKG. Rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan konteks spesifik Kecamatan Tanggulangin.



Gambar 1. Kegiatan KKG Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di kecamatan Tanggulangin

SIMPULAN

Hasil penelitian terhadap kebijakan KKG Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin menunjukkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi profesional guru, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dukungan manajemen sekolah, serta kesenjangan antara materi pelatihan dan praktik di kelas. Faktor lokal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan KKG, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih kontekstual. Evaluasi menggunakan model CIPP juga menunjukkan perlunya penguatan dalam penggunaan teknologi, peningkatan fasilitator, dan penyederhanaan prosedur birokrasi. Rekomendasi utama mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, dukungan praktis dalam implementasi pembelajaran, serta pengembangan pelatihan yang lebih aplikatif agar KKG benar-benar menjadi wadah pengembangan profesionalisme guru yang efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- BERA. (2018). *Ethical guidelines for educational research*. British Educational Research Association.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.
- Darling-Hammond, L. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage.
- Dinas Pendidikan Sidoarjo. (2022). *Laporan monitoring KKG*.
- Fahrudin, M. (2019). Evaluasi implementasi kegiatan kelompok kerja guru (KKG) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(3), 215–228.
- Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change*. Teachers College Press.
- Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching*, 8(3), 381–391. <https://doi.org/10.1080/135406002100000512>
- Guskey, T. R. (2014). *Evaluating professional development*. Corwin Press.
- Hargreaves, A. (2021). *Well-being and professional collaboration in teachers*. Routledge.
- Jannah, S. (2020). Kesenjangan antara pelatihan guru dan implementasi di kelas: Studi kasus pelatihan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 7(2), 101–113.
- Kemdikbud. (2021). *Laporan hasil monitoring program Guru Belajar dan Berbagi*. Kemendikbud.
- Melda, D., Kurnia, N., & Hidayat, R. (2024). Evaluasi proses kegiatan kelompok kerja guru di Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 15(1), 75–89.

- Musmulyadi, A. (2022). Kegiatan kelompok kerja guru (KKG) dalam meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Guru dan Pembelajaran*, 10(4), 255–268.
- Nur Marhamah, R. (2022). Peran KKG dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Soppeng. *Jurnal Pendidikan Agama*, 8(3), 201–212.
- Nurkamto, J. (2019). KKG sebagai sarana penguatan literasi Bahasa Indonesia. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7(3), 201–215.
- OECD. (2018). *Teaching and learning international survey (TALIS)*. OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2017). *Principles-focused evaluation: The GUIDE*. Guilford Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.
- Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kompetensi Guru.
- Prastowo, A. (2018). Pengembangan kompetensi guru melalui KKG di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 45–60.
- Rachmadtullah, R., et al. (2021). Evaluasi kebijakan KKG dalam konteks pembelajaran jarak jauh. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 33–45.
- Rizky, W. (2017). Analisis kesenjangan antara pelatihan guru dan aplikasi praktis di kelas. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(4), 143–157.
- Rustandi, D., & Putri, M. (2024). Evaluasi program PPG dalam jabatan dan implikasinya terhadap kompetensi guru di Kabupaten Pamulang. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Guru*, 12(1), 105–118.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage.
- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP model for evaluation: A checklist to guide evaluation decisions*. Springer.
- Susanto, R., & Retnawati, H. (2020). Evaluasi program KKG dalam meningkatkan kompetensi guru Bahasa Indonesia. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(2), 112–125.
- Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach's alpha in science education research. *Springer*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92363-1>
- Tufte, E. R. (2020). *The visual display of quantitative information* (2nd ed.). Graphics Press.
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon declaration and framework for action*. UNESCO.
- UNESCO. (2019). *Teacher policy development guide*. UNESCO Publishing.
- Wartoni, A., & Kartowagiran, K. (2020). Evaluasi program BERMUTU dalam peningkatan kualitas guru melalui KKG di Kabupaten Batang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2), 45–58.
- World Bank. (2020). *Improving teacher competency in Indonesia: Lessons from KKG and MGMP*. World Bank.
- Wulandari, R. (2017). Kesenjangan antara pelatihan guru dan implementasi di kelas: Faktor penghambat dan solusinya. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 6(3), 89–100.
- Yanti, S., & Supriyanto, R. (2021). Evaluasi masukan dalam program KKG dan dampaknya terhadap peningkatan kompetensi guru Bahasa Indonesia. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(2), 213–224.
- Yulianto, B., et al. (2022). Digitalisasi KKG: Solusi peningkatan kapasitas guru Bahasa Indonesia di daerah 3T. *Prosiding Seminar Nasional*.